

Makna Sosial Program PKH dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Desa Kedungpari, Jombang

Annisa¹, Muhammad Nur Hidayat², Nieke Rudyanty Winanda³

^{1,2} Program Studi Sosiologi, Universitas Darul 'Ulum

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Darul 'Ulum

(email: annisandy21@gmail.com)

Abstrak

Program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat oleh pemerintah yang ditujukan untuk keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sementara itu, dalam penerapan program bantuan sosial PKH ini mengalami banyak sekali kasus tentang penyalahgunaan atau alih fungsi dana yang telah diberikan pada penerima manfaat. Tindakan tersebut disebabkan dua motif, yaitu motif sebab dan motif tujuan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui konteks sosial yang melatarbelakangi individu dalam proses penggadaiannya kartu PKH, serta untuk mengetahui tindakan individu dalam perilaku menggadaikan kartu PKH. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Alfredz Schutz. Pemilihan informan menggunakan teknik purposif dengan kriteria individu yang masuk dalam anggota penerima bantuan PKH yang berjumlah 8 orang. Hasil penelitian didapatkan terdapat empat motif dalam penggadaian kartu PKH yaitu 1) melakukan penggadaian dengan motif terlilit hutang. 2) melakukan penggadaian kartu PKH dengan motif gaya hidup dan status sosial. 3) Dilematis Sosial Penerima Bantuan. 4) Simpan Pinjam Antar anggota PKH.

Kata kunci: Makna sosial; PKH; kesejahteraan; Rumah tangga miskin

Abstract

Program keluarga harapan is a conditional social assistance program by the government aimed at poor families designated as PKH beneficiary families. Meanwhile, in the implementation of this PKH social assistance program experienced many cases about the misuse or transfer of the function of funds that have been given to beneficiaries. The action is caused by two motives, namely the motive of cause and motive of purpose. This study sought to find out the social context behind the individual in the process of using the PKH card, as well as to find out the actions of individuals in the behavior of pawning PKH cards. The study used Alfredz Schutz's phenomenological approach. The selection of informants uses purposive techniques with individual criteria that are included in the PKH assistance recipient members of 8 people. The results of the study on the ground there are four motives in the pawning of PKH cards, namely 1) to carry out pawning with a motive in debt. . 2)

perform pkh card pawning with lifestyle and social status motives. 3) Social Dilemma of Beneficiaries. 4) Save Borrow Between PKH members.

Keyword: PKH; Social Meaning; well being; poor household

Pendahuluan

Program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat oleh pemerintah yang ditujukan untuk keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini ada sejak tahun 2007 dengan tujuan awal sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Jika di Indonesia dikenal sebagai PKH maka di dunia Internasional dikenal dengan nama *Conditional Cash Transfers* (CCT). Program perlindungan sosial ini terbukti telah berhasil memberantas kemiskinan di Negara pelaksana CCT terutama kasus kemiskinan kronis. Sedangkan PKH menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 1 yang dimaksud dengan program keluarga harapan (PKH) ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dengan itu dapat dijelaskan bahwa penerima manfaat PKH harus melalui survey lapangan yang selanjutnya data yang diperoleh akan diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.

Sementara itu, (Asuah and Zumelzu 2021) menyebutkan bahwa keberagaman sosial dan spasial dalam hal campuran kegiatan perkotaan, karakteristik sosial ekonomi penduduk. Dan dalam penerapan program bantuan sosial PKH ini mengalami banyak sekali kasus tentang penyalahgunaan atau alih fungsi dana yang telah diberikan pada penerima manfaat. Salah satu penyalahgunaan kartu program bantuan PKH adalah penggadaian kartu PKH. Fakta lapangan menunjukkan bahwa alasan yang melatarbelakangi kegiatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak yang mendesak dan harus segera dipenuhi juga untuk keperluan mendesak lainnya. Sedangkan alasan yang paling banyak dijumpai yaitu untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo dengan cara menggadaikan kartu PKH ini. Bahkan jika ditelusuri semakin dalam, penyebab penerima manfaat bantuan PKH ini terlilit banyak hutang adalah pola gaya hidup yang tidak sesuai dengan keadaan nyata.

Dalam kajian fenomenologi, terdapat dua konsep dasar yang menjadi alasan dasar untuk melakukan suatu tindakan. Diantarnya adalah *intersubjective* dan *stock of knowledge*. Yang dimana *intrasubjective* ini adalah pemilihan tindakan yang didasari oleh pengalaman masalah dan *stock of knowledge* adalah tindakan yang didasari oleh pemahaman masing-masing penerimaan makna pada individu. Berdasarkan fenomena tersebut, tindakan yang dilakukan oleh individu didasari oleh dua motif tindakan yaitu berdasarkan pengalaman masalah (*because motive*) dan orientasi masadepan (*in order motive*) sehingga tindakan tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Misalnya dalam kasus penggadaian kartu PKH

tersebut memiliki motif pengalaman masa lalu (*because motive*) karena terlilit hutang dikarenakan pola gaya hidup yang konsumtif dan cenderung menghamburkan uang dan berhubungan dengan motif orientasi masa depan (*in order motive*) karena kartu PKH adalah barang jaminan yang meyakinkan, akhirnya individu rela untuk menggadaikan dengan maksud tujuan agar hutangnya terlunasi.

Dalam perspektif (Schutz,1967) proses pemaknaan suatu hal diawali dengan proses penginderaan, yang suatu proses tersebut akan terus berkesinambungan. Pada awalnya arus penginderaan ini tidak memiliki makna, makna tersebut muncul ketika dihubungkan dengan pengalaman- pengalaman sebelumnya serta melalui proses interaksi dengan orang lain. Bagi (Schutz 1967) tindakan manusia selalu punya makna yang menurut Weber makna itu identik dengan motif tindakan. Namun makna tersebut tidak ada yang bersifat aktual dalam kehidupan .

Tindakan penggadaian kartu PKH ini dinilai sebagai perilaku yang menyimpang dari tujuan awal pemerintah memberikan bantuan tersebut. Fakta dilapangan menunjukan bahwa tindakan tersebut juga sudah menjadi rahasia umum, lantas hingga sekarang belum ada tindakan dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Akan tetapi masyarakat tidak sepenuhnya salah karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa pemaknaan tentang bantuan PKH ini masih belum sepenuhnya paham. Adapun sekelompok masyarakat yang berfikir bahwa bantuan PKH ini sebagai upaya pemerintah memberantas kemiskinan dengan memberi sejumlah uang untuk menunjang perekonomian dan pendidikan keluarga penerima manfaat. Juga terdapat individu yang beranggapan bahwa bantuan PKH ini hanya sebagai program yang dilakukan pemerintah untuk memberikan dana hibah yang bisa dipergunakan sebebas mungkin oleh keluarga penerima manfaat. Perbedaan perspektif di masyarakat ini menyebabkan munculnya penyimpangan dalam pemanfaatan kartu PKH. Data di masyarakat penyebab individu menggadaikan kartu PKH adalah faktor ekonomi, yang dimana menerapkan gaya hidup konsumtif dan akhirnya berani berhutang. Dan saat hutang tersebut sudah jatuh tempo menggadaikan kartu PKH dianggap paling cocok digunakan untuk jaminan.

Tindakan tersebut tidak lepas dari orientasi masalah atau motif sebab (*because motive*) dan orientasi masa depan atau motif tujuan (*in order motive*). Dalam tindakan ini motif sebab penggadaian PKH adalah kartu PKH ini adalah salah satu barang yang bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah dana, karena bantuan PKH ini biasanya cair atau turun tiap tiga bulan sekali. Serta motif tujuannya adalah untuk melunasi hutang sebelumnya yang pernah dilakukan untuk mencukupi kebutuhan gaya hidup yang terlalu berlebihan atau cenderung foya-foya dan tidak disesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami. Dalam tindakan ini, pendekatan teori fenomenologi dirasa cocok untuk mengidentifikasi atau menjelaskan motif tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam tindakan penggadaian kartu PKH tersebut.

Dalam kasus ini, sudah banyak penulis yang mengkritisi dan melakukan pengamatan terhadap fenomena pemanfaatan kartu PKH di masyarakat. Sejauh ini

penulis-penulis tersebut hanya menemukan kelebihan dan ragam manfaat dari adanya program bantuan ini. Seperti yang dikemukakan oleh (Mayangsari 2019) yang mana ia menemukan bahwa banyak sekali ragam manfaat yang didapat melalui program ini. Antara lain para penerima manfaat bantuan PKH yang mempunyai anak yang bersekolah di jenjang SD sampai SMA merasa sangat terbantu dengan adanya dana ini. Selain itu, ia juga menemukan fakta bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat bantuan PKH tidak memiliki pekerjaan tetap atau dengan kata lain bekerja serabutan. Yang dimana pendapatan upah yang tidak teratur. Pada prinsipnya dalam temuan ini mengemukakan bahwa dengan adanya PKH ini sangat membantu masyarakat penerima manfaat untuk keberlangsungan hidup mereka. Adapun temuan yang dikemukakan oleh (Utomo 2014) berdasarkan fakta yang ditemukan bahwasanya penerima PKH mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut dengan adanya sanksi yang diberikan. Sedangkan fakta-fakta di daerah lain sudah cenderung berbeda dengan temuan-temuan terdahulu. Maka dari itu penulis ingin mengemukakan temuan baru dalam pemanfaatan PKH tersebut.

Untuk mendapatkan data yang dimaksudkan penulis menggunakan pendekatan fenomenologi yang dimana didalamnya memiliki dua konsep yaitu intersubjektif dan *stock of knowledge*. dalam konsep *stock of knowledge* diartikan sebagai pengetahuan terbatas individu yang dijadikan sebagai dasar menentukan tindakan, dalam konsep ini terdapat dua motif yaitu orientasi masalalu atau motif sebab (because motive) dan orientasi masa depan atau motif tujuan (in order motive). Because motive berarti orientasi masalalu atau pengalaman yang mendasari dalam menentukan suatu tindakan. Sedangkan in order motive berarti orientasi masa depan atau harapan yang akan dicapai yang mendasari dalam menentukan suatu tindakan.

Adapun temuan terdahulu mengenai fenomena pemanfaatan PKH ini, seperti pada (Mayangsari 2019) ia juga menemukan keberadaan dua faktor yaitu negatif dan positif terhadap pemakaian dan penggunaan kartu PKH ini. Sedangkan menurut (Utomo 2014) ia menemukan hanya ada satu faktor saja. Ia menyebutkan hanya ada faktor pendukung atau positif yang ditemukan dalam memanfaatkan dana bantuan PKH serta penerima manfaat juga mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut dengan adanya sanksi yang diberikan.

Dengan adanya temuan diatas, maka penulis ingin menganalisis penyimpangan dalam perilaku pemanfaatan bantuan PKH tersebut. Karena hingga saat ini belum ada penelitian yang lebih lanjut mengenai cara penerima bantuan untuk membelanjakan atau menggunakan kartu tersebut secara baik, benar dan sesuai dengan fungsinya juga jenis penyalahgunaan yang dilakukan. Juga ingin menggali lebih dalam apa sebenarnya motif tujuan individu dalam penyalahgunaan dana bantuan tersebut.

Dalam pemahaman masyarakat mengenai bantuan PKH juga karena adanya fenomena penyimpangan manfaat bantuan tersebut. Peneliti berusaha menganalisis motif dalam penggadaian kartu PKH tersebut. Lebih spesifik lagi peneliti dapat

mengetahui motif tindakan individu dalam perilaku menggadaikan kartu PKH. Dan untuk mengetahui motif apa yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut apakah orientasi masalalu (*because motive*) ataupun orientasi masadepan (*in order motive*).

Metode

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui konteks sosial yang melatarbelakangi individu dalam proses penggadian kartu PKH, serta untuk mengetahui tindakan individu dalam perilaku menggadaikan kartu PKH. Dan untuk mengetahui motif apa yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut apakah orientasi masalalu (*because motive*) ataupun orientasi masadepan (*in order motive*). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis Alfred Schutz. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan ialah teknik wawancara mendalam terhadap informan yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Penulis memilih informan dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH karena untuk mengetahui pemaknaan dari bantuan tersebut, serta agar mempermudah penulis untuk mengetahui motif yang ada dalam perilaku masyarakat dalam menggadaikan kartu PKH.

Subjek penelitian ini berjumlah 7 orang. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan observasi. Wawancara yang dikendekaki ialah wawancara tidak terstruktur dan dilakukan secara langsung dalam bentuk Tanya jawab oleh narasumber yang menjadi informan. . Dalam pengumpulan data juga menggunakan teknik *non probability* dan lebih spesifik menggunakan teknik *purposive* yang dalam penentuannya didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan konteks yang diambil . Kriteria-kriteria yang diambil pun diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh dari informan selanjutnya dianalisis dengan cara melakukan penyajian data. Menurut (Subadi 2006) Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lalu dalam Penyajian data tersebut berbentuk *teks naratif*, teks dalam bentuk catatan hasil wawancara dengan informan sebagai informasi terstruktur yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Tabel 1. Data informan

Inisial	Usia	waktu mendapat PKH (tahun)
TW	53 tahun	5 tahun
TK	52 tahun	5 tahun
NN	54 tahun	4 tahun
NS	41 tahun	10 tahun
SL	52 tahun	5 tahun
NT	50 tahun	3 tahun

TI	43 tahun	2 tahun
----	----------	---------

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari wawancara terhadap delapan informan dengan ketentuan informan adalah penerima bantuan PKH, terdapat beberapa motif tindakan yang dilakukan oleh penerima bantuan PKH. Adanya tindakan tersebut karena adanya pengalaman yang telah dilalui dan tujuan yang hendak dicapai. Sebagian pernah melakukan penggadaian kartu PKH dan sebagian merasa takut akan dicabut bantuannya karena ketahuan menggadaikan kartu PKH adapula yang merasa takut untuk menggadaikan kartu PKH karena takut dilaporkan ke pendamping PKH dan menjadi bahan pembicaraan tetangga. Adapun temuan lain yang menunjukkan bahwa seseorang penerima bantuan PKH juga menjadi tempat penggadaian PKH oleh tetangganya. Untuk penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dari penjelasan berikut.

Penggadaian PKH : Terlilit hutang

Penggadaian ini berasal dari kata gadai yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Perilaku penggadaian juga telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan dengan banyaknya perilaku tersebut, terdapat perseroan yang menawarkan jasa ini. Perilaku penggadaian kartu PKH ini sudah banyak dilakukan oleh penerima manfaat. Banyak alasan yang disebutkan mengenai latar belakang penggadaian ini. Bahkan bagi masyarakat penerima bantuan PKH perilaku seperti ini bukan jadi rahasia umum.

Perilaku berhutang menurut Hornby dalam (Shohib 2015) Seseorang dikatakan berhutang manakala mereka memiliki pinjaman terhadap bank, kartu kredit atau tidak mampu menyelesaikan tagihan rumah tangganya. Tapi dengan seiring berkembangnya waktu perilaku berhutang tidak hanya di bank saja. Perilaku berhutang juga banyak dijumpai di lingkup kecil misalnya hutang antar tetangga.

Subjek menyebutkan pernah menggadaikan kartu PKH kepada tetangganya karena terlilit hutang dan harus segera dilunasi. Dengan latar belakang tersebut dirasa kartu PKH adalah barang berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam melakukan transaksi penggadaian. Subjek juga mengatakan bahwa kartu PKH ini adalah barang yang dapat meyakinkan individu untuk memberi pinjaman dan dirasa pasti dapat pinjaman. Karena menurut pemahaman orang awam, keluarga penerima manfaat bantuan PKH adalah keluarga tidak mampu yang benar-benar membutuhkan uang. Maka dari itu subjek berani melakukan penggadaian PKH kepada tetangganya. Jika dilihat lebih jauh, motif penggadaian kartu PKH ini dikarenakan untuk melunasi hutang sebelumnya yang dipergunakan untuk membeli kebutuhan sekolah seperti buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dimana jika ditunda

pembayarannya mengakibatkan tertinggal oleh pelajaran di kelas. Subjek juga menyebutkan bahwa bantuan PKH jika dirasakan memang kurang untuk kebutuhan sekolah anak.

Adapun alasan lain yang melatar belakangi perilaku tersebut. Latar belakang keluarga subjek adalah keluarga tidak mampu dengan pekerjaan kepala keluarga menjadi tenaga kerja serabutan. Yang mana tenaga serabutan ini bisa bekerja apabila ada seseorang yang membutuhkan tenaganya. Apalagi di lingkup desa, tenaga kerja serabutan harus menunggu musim untuk dapat bekerja. Oleh karena itu perolehan upah tidak bisa stabil tiap bulannya dan mengakibatkan keluarga tersebut harus berhutang. Subjek juga menyebutkan bahwa dengan adanya bantuan PKH ini terkadang proses pencairan dananya tertunda atau tidak tepat waktu. Hal ini juga yang dijadikan alasan untuk menggadaikan kartu ini kepada tetangganya. Ia memilih menggadaikan di tetangga karena jika ditanyai perihal kartu oleh pendamping bisa dipinjam terlebih dahulu.

Subjek selanjutnya menyebutkan bahwa dahulu sebelum marak kasus penggadaian PKH ia sudah melakukan penggadaian kepada tetangganya. Penggadaian ini dilatarbelakangi oleh keadaan subjek yang sedang terlilit hutang. Alasan berhutang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan minum dan sebagainya. Nominal penggadaian pun tidak banyak hanya sekitar dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah. Subjek memilih menggadaikan kartu PKH karena terdapat jaminan pasti dana akan turun setiap tiga bulannya. Uang hasil penggadaian ini nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan minum dan sebagainya. Bahkan sering diperuntukkan untuk jajan anak. Karena usia anak yang masih tergolong kecil maka dirasa banyak membutuhkan biaya untuk tumbuh kembang anak. Hal ini terjadi dikarenakan kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya sebagai tenaga kerja serabutan. Dan untuk sedikit meringankan beban maka ia berani melakukan proses penggadaian.

Subjek juga menyebutkan bahwa perolehan bantuan PKH ini sangat membantu perekonomian keluarganya. Meskipun jika dihitung tidak seberapa besar nominalnya, akan tetapi setidaknya dapat menjadi jaminan pasti untuk melanjutkan keberlangsungan hidup keluarganya. Subjek juga menyebutkan bahwa jika ia tidak karena terlilit hutang yang harus segera di lunasi maka ia tidak akan berfikir sejauh ini untuk menggadaikan kartu PKH. Subjek juga mengaku bahwa terkadang dirinya takut ketahuan jika telah melakukan transaksi penggadaian. Akan tetapi keadaan ekonomilah yang mendorong subjek untuk melakukan transaksi penggadaian.

Memang banyak hasil temuan yang menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga penerima bantuan PKH bermata pencaharian sebagai pekerja serabutan seperti yang dijelaskan oleh (Mayangsari 2019) dalam temuannya yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat penerima bantuan PKH bukan sebagai pekerja atau karyawan tetap. Akan tetapi pekerja serabutan yang gajinya tidak menentu.

(Mayangsari 2019) juga menyatakan bahwa terdapat faktor negatif dari bantuan PKH. Faktor tersebut adalah bantuan PKH sering salah diartikan oleh Rumah Tangga miskin yaitu dibelanjakan untuk kebutuhan pokok, dan juga masyarakat malas bekerja dan sangat berharap pada bantuan PKH tersebut.

Penjelasan yang telah dinyatakan oleh kedua subjek tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dalam pemaknaan intersubjektivitasnya tidak memiliki kesamaan. Jika subjek pertama menyebutkan bahwa dirinya menggadaikan PKH karena uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sekolah anaknya. Subjek merasa bahwa hutangnya untuk membeli perlengkapan sekolah anak harus dilunasi maka ia memberanikan diri untuk menggadaikan kartu PKH. Jika dilihat dalam tindakan perilaku subjek pertama cenderung mengarah kepada orientasi masa depan (*in order motive*) agar hutang sebelumnya dapat terlunasi. Sedangkan subjek berikutnya menyebutkan bahwa dirinya melakukan penggadaian PKH karena terdesak oleh keadaan ekonomi yang sedang kekurangan. Subjek juga menyebutkan bahwa terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti jajan anak dan sebagainya. Subjek kedua cenderung mengarah ke orientasi pengalaman masalah (*because motive*), yakni berani menggadaikan karena terdesak kebutuhan ekonomi yang ada.

Penggadaian PKH : Gaya hidup dan Status Sosial

Gaya hidup pada masa sekarang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu saja melainkan bisa dipengaruhi oleh bermacam faktor. Menurut (Muntiyani 2006) Beraneka ragamnya produk yang ada dipasaran akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap pembelian dan pemakaian barang, maka pembelian dan pemakaian suatu produk pada saat ini bukan lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan (*need*), tetapi sering sekali pembelian dan pemakaian produk didorong oleh keinginan (*want*) yang sikapnya bisa ditunda. Gaya hidup yang demikian semakin membuat terdorongnya perilaku konsumtif bagi individu.

Subjek menyebutkan bahwa ia pernah menggadaikan kartu PKH sekitar 2 tahun yang lalu karena mengikuti gaya hidup. subjek menggadaikan kartu PKH untuk membayar cicilan motor yang sudah jatuh tempo. Subjek juga menyebutkan bahwa jika cicilan tidak segera dilunasi maka berakibat morotnya akan ditarik oleh pihak *dealer*. Karena adanya ancaman seperti ini maka subjek berfikir untuk menggadaikan kartu PKH. Subjek menggadaikan kartu PKH karena dianggap kartu PKH adalah satu-satunya barang yang dapat dibuat jaminan tanpa mengurangi barang berharga yang ada dirumahnya. Hal yang melatarbelakangi perilaku subjek tersebut adalah perilaku konsumtif dan cenderung senang *berfoya-foya*. Perilaku suka *gengsi* yang menyebabkan perilaku hingga berani menggadaikan kartu bantuan PKH.

Subjek juga menyebutkan bahwa dirinya pernah melakukan penggadaian di agen pegadaian seperti bank perkreditan rakyat (BPR). Dengan syarat menyertakan buku rekening, jika syarat sudah terpenuhi akhirnya dapat dilakukan proses pencairan

dana. Ia menyebutkan bahwa dengan penggadaian kartu PKH tidak menjadi masalah karena saat itu periode pencairan dana sudah terjadwal dan subjek bisa menebusnya dengan tempo yang singkat dan diusahakan sebelum tanggal pencairan dana bantuan PKH tersebut. Meskipun begitu dulu saat pengambilan uang PKH juga bisa melalui bank atau kantor pos. Jadi tidak harus datang ke kantor desa dan tidak perlu di cek kelengkapan kartunya. Hal inilah yang melatarbelakangi informan untuk melakukan penggadaian kartu PKH saat itu.

Karena banyaknya perilaku penggadaian seperti ini maka pihak pendamping PKH mengeluarkan kebijakan baru. Saat ini proses pencairan dana bantuan PKH saat ini sudah dikoordinir oleh setiap pendamping. Pendamping menghendaki pencairan dana bantuan PKH dilakukan pada setiap dusun. Setelah melakukan pengambilan dana maka penerima bantuan wajib melakukan foto diri dengan membawa dana bantuan dan kartu ATM yang nantinya akan dikumpulkan secara kolektif dan diberikan kepada ketua kelompok dan selanjutnya diserahkan kepada pendamping PKH.

Subjek juga menyatakan bahwa perilaku penggadaian tersebut telah diketahui oleh pendamping PKH dan aparat desa. Akibat dari perilaku tersebut, subjek terpaksa dikeluarkan dari keanggotaan penerima manfaat bantuan PKH ini. Karena perilaku tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan dana yang sangat fatal dan harus ditindak tegas. Karena peristiwa itu juga keluarga pelaku penggadaian kartu ini tidak pernah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah. Baik dana bantuan PKH ataupun dana bantuan yang lain seperti bantuan pangan non tunai dan sebagainya.

Penjelasan yang telah dinyatakan oleh subjek dapat disimpulkan bahwa motif penggadaian kartu PKH adalah untuk mengikuti gaya hidup. Tindakan tersebut bertujuan untuk terlihat kaya di depan orang lain. Subjek memiliki tindakan berdasarkan intersubjektivitasnya. Subjek memaknai sebelumnya perilaku penggadaian PKH ini adalah hal biasa dan bisa disembunyikan dan tidak bisa terdeteksi oleh pihak manapun (*because motive*). Akan tetapi akibat dari perilakunya subjek dikeluarkan dari keanggotaan bantuan PKH.

Penggadaian PKH : Dilematis Sosial Penerima Bantuan

Tidak sedikit pula penerima manfaat bantuan PKH yang merasa takut akan dikeluarkan dari keanggotaan bantuan PKH. Oleh karena diperketatnya aturan penerima manfaat bantuan PKH maka banyak orang yang merasa takut untuk melakukan perilaku penyalahgunaan dana bantuan PKH. Ketaatan pada aturan yang berlaku tentu saja berhubungan dengan pendamping PKH. Hal ini didukung oleh penelitian (Nurchotimah et al. 2020) Pendamping Program Keluarga Harapan selain mendampingi keluarga penerima manfaat dalam pencairan bantuan juga melakukan edukasi terhadap keluarga penerima bantuan. Pendamping juga harus mengetahui sejak dini titik permasalahan yang sedang dialami penerima manfaat, agar permasalahan tersebut dapat tertangani sebelum menjadi besar.

Subjek pertama menyebutkan bahwa tidak pernah menggadaikan kartu PKH lantaran takut akan dikeluarkan dalam daftar penerima manfaat bantuan PKH. Subjek beranggapan bahwa kartu PKH adalah kartu bantuan yang diawasi pemerintah setiap saat. Dan dapat juga dipertanyakan penggunaan dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang tertentu. Dengan itu penerima bantuan PKH harus dapat mempertanggungjawabkan pengalokasian dana yang telah dilakukan. Jadi tidak bisa digunakan sembarangan. Ia juga menyebutkan bahwa jika ia menaati peraturan pemerintah yang berlaku maka proses apapun yang berkaitan dengannya akan dipermudah. Saat proses pendampingan kepada penerima bantuan PKH pendamping juga sering kali menekankan bahwa penerima manfaat PKH harus mematuhi peraturan yang berlaku. Guna menciptakan program yang tepat sasaran maka proses pendampingan diperketat. Bahkan saat ini penerima kartu PKH hanya diberi kartu anjungan tunai mandiri (ATM) tanpa disertakan buku rekeningnya.

Subjek selanjutnya mengatakan bahwa ia tidak mau menggadaikan PKH lantaran takut dengan acaman akan dikeluarkan dari keanggotaan. Karena sejak maraknya kasus penggadaian dalam kurun waktu terakhir ini maka peraturan yang ditujukan kepada anggota penerima bantuan diperketat. Subjek juga merasa takut untuk menggadaikan kartu PKH karena terdapat tetangga yang telah dikeluarkan dari keanggotaan bantuan PKH. Subjek juga menyatakan bahwa jika dirinya terdesak dengan keadaan perekonomian yang mendesak ia tidak melakukan penggadaian PKH. Akan tetapi ia memilih untuk berhutang pada koperasi BUMDES atau sejenisnya. Walaupun terdapat perhitungan bunga, akan tetapi bunganya tidak terlalu memberatkan. Atau bisa disebut bunga ringan. Subjek juga tidak menghiraukan adanya tetangga yang melakukan penggadaian kartu PKH walaupun nominalnya besar. Subjek mengatakan bahwa dirinya tidak mau ikutan atau sekedar Tanya. Subjek takut jika terdapat pemeriksaan dirinya akan ikut terjerat pada kasus tersebut.

Subjek ketiga menyatakan tidak berani menggadaikan kartu PKH karena takut menjadi bahan pembicaraan tetangga akibat perilakunya yang menyimpang tersebut. Karena tempat tinggal subjek ditengah-tengah keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani maka banyak tetangga yang tidak memiliki pekerjaan sebelum masa panen tiba. Kondisi lingkungan seperti ini membuat dirinya takut ketahuan jika melakukan perilaku yang menyimpang. Agar nama baiknya tetap terjaga akhirnya subjek tidak berani melakukan penggadaian PKH. Subjek juga menyatakan bahwa dirinya pernah berfikir untuk melakukan penggadaian kartu PKH karena memang hal tersebut dirasa menjadi tindakan satu-satunya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Akan tetapi ketakutan akan dijadikan bahan pembicaraan tetangga membuat subjek mengurungkan niatnya. Selain takut menjadi bahan pembicaraan subjek juga menyatakan bahwa dirinya takut akan dilaporkan kepada pendamping PKH. Yang akibat akhirnya akan dikeluarkan dari keanggotaan bantuan PKH.

Dari hasil yang didapat banyak informan yang merasa takut untuk menggunakan kartu PKH karena akhir-akhir ini memang diawasi oleh pihak pendamping, para pemegang kartu baru tidak disertakan buku tabungan rekening karena jika ingin menggunakan harus menyertakan buku rekening. Juga rutin dilakukan pertemuan antar anggota yang diperuntukkan sebagai wadah untuk bersosialisasi antar anggota PKH dan pendamping. Saat menghadiri acara sosialisasi rutin para pemegang kartu PKH juga disuruh untuk membawa kartu PKH guna untuk pengecekan. Jadi bila ada penyimpangan terhadap penggunaan kartu PKH ini akan sesegera mungkin terdeteksi.

Dengan adanya sosialisasi rutin ini berdampak pada perilaku masyarakat dalam menggunakan dana bantuan ini. Orang yang dulunya berani menggunakan kartunya untuk kepentingan lain diluar ketentuan dalam program bantuan PKH sekarang sudah mulai berkurang. Dengan adanya sosialisasi ini menjadikan bantuan PKH tepat guna. Selain memperketat pengawasan dan peraturan pihak PKH juga menghendaki ketentuan bukti struk pengambilan dana wajib di tempel di buku khusus yang telah disiapkan dan di cek secara berkala.

Penjelasan yang telah dinyatakan oleh ketiga subjek tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. berdasarkan intersubjektivitas ketiga subjek tersebut, dapat terlihat bahwa motif perilaku yang dilakukan atas dasar orientasi masa depan (*In order motive*). Subjek pertama dan kedua merasa takut untuk melakukan perilaku penggunaan kartu PKH karena ancaman akan dikeluarkan dari keanggotaan penerima bantuan PKH. Sedangkan subjek ketiga merasa takut untuk melakukan perilaku penggunaan kartu PKH karena takut dilaporkan dan dijadikan bahan pembicaraan oleh tetangganya.

Penggunaan PKH: Simpan Pinjam Antar anggota PKH

Selain perilaku penggunaan kartu PKH. Ternyata peneliti juga menemukan informan yang biasa dijadikan tempat penggunaan kartu PKH. Subjek juga merupakan anggota dari bantuan PKH. Akan tetapi dirinya bisa dikatakan memiliki kehidupan yang cukup mapan. Hal ini juga menjadikan temuan baru bagi peneliti. Subjek juga bertempat tinggal tidak jauh dari beberapa orang yang menggunakan kartu PKH kepadanya.

Menurut (Sasmito 2009) Seseorang dapat langsung berhubungan dengan Perum Pegadaian bila bermaksud mendapatkan kredit dari lembaga keuangan tersebut dengan cara memproduktifitas barang berharga miliknya sebagai jaminan kredit gadai. Akan tetapi proses penggunaan

Salah satu subjek menyebutkan bahwa ia biasa dijadikan sebagai tempat penggunaan kartu PKH oleh tetangganya. Subjek mengaku bahwa dirinya juga anggota program bantuan PKH akan tetapi dilihat dari segi materi ia cukup mapan. Indikator mapan disini merujuk kepada dirinya yang mempunyai sawah milik pribadi

yang cukup luas dan beberapa ternak berupa sapi dan ayam. Ia menyebutkan bahwa ia adalah anggota bantuan PKH baru dan baru dua tahun ini mendapatkan bantuan program PKH. Alasan subjek mendapatkan bantuan PKH karena saat ada pendataan masyarakat kurang mampu atau keluarga miskin subjek mencoba untuk mengikuti alur dan tata cara pendaftaran dan akhirnya subjek lolos pemberkasan hingga sekarang ini mendapat manfaat bantuan PKH tersebut.

Alasan subjek mau menjadikan kartu PKH sebagai jaminan untuk meminjamkan uang karena menurutnya kartu PKH ini mempunyai kepastian jadwal pencairan bantuan. Jadi saat sudah masanya pencairan dana sesegera mungkin orang yang menghutang mengembalikan uang yang dipinjam. Adapun alasan yang di jelaskan bahwa nominal jumlah uang yang diberikan pemerintah belum bisa mencukupi biaya yang dibutuhkan dalam sehari-hari, misalnya untuk biaya sekolah. Kerap kali terdapat kekurangan dalam proses pengalokasian dana tersebut. Untuk itu didasarkan dari keibaan hati informan kelima ini ia mau meminjamkan uang dengan jaminan kartu PKH.

Sebagai tempat penggadaian kartu PKH oleh tetangga, subjek juga memberlakukan ketentuan mengenai waktu dan jumlah nominal pinjaman kepada pelaku penggadaian. Waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan penggadaian adalah waktu pencairan dana bantuan pertama atau pencairan kedua. Adapun nominal yang dipinjamkan tidak terlalu besar hanya kisaran 200-500 ribu rupiah saja. Subjek melakukan hal ini karena didasari oleh nominal pencairan dana bantuan PKH hanya kisaran nominal tersebut tergantung keadaan penerima bantuan PKH.

Subjek memilih PKH sebagai jaminan dengan alasan untuk dijadikan barang jaminan pasti selain itu dengan tujuan agar kartu PKH ini tidak digadaikan kepada orang lain yang tidak dikenal. Subjek juga beralasan menjadikan kartu PKH sebagai jaminan agar orang yang berhutang kepadanya bertanggung jawab untuk menebusnya. Subjek menyatakan bahwa seandainya ada orang yang berhutang bukan anggota dari penerima bantuan PKH maka dia tidak memberlakukan jaminan akan tetapi ketepatan waktu yang telah dijanjikan untuk mengembalikannya.

Penjelasan yang dinyatakan oleh subjek jika di dasarkan pada interubjektivitasnya dapat terlihat bahwa motif perilaku memberikan pinjaman dengan jaminan kartu PKH didasarkan dari orientasi masa depan (*in order motive*). Subjek melakukan perilaku tersebut karena ingin membantu tetangganya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang dengan cepat. Selain itu pemberlakuan pemberian jaminan kartu PKH juga bertujuan agar agar kartu PKH ini tidak digadaikan kepada orang lain yang tidak dikenal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat motif penggadaian kartu PKH antara lain: 1) melakukan penggadaian dengan motif terlilit hutang. 2) melakukan penggadaian kartu PKH dengan motif gaya

hidup dan status sosial. 3) Dilematis Sosial Penerima Bantuan. 4) Simpan Pinjam Antar anggota PKH. Keempat motif tersebut memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. Motif pertama Jika dilihat dalam tindakan perilaku subjek pertama cenderung mengarah kepada orientasi masa depan (*in order motive*) agar hutang sebelumnya dapat terlunasi. Subjek kedua cenderung mengarah ke orientasi pengalaman masalah (*because motive*), yakni berani menggadaikan karena terdesak kebutuhan ekonomi yang ada. Sedangkan motif kedua subjek memaknai sebelumnya perilaku penggadaian PKH ini adalah hal biasa dan bisa disembunyikan dan tidak bisa terdeteksi oleh pihak manapun (*because motive*). Akan tetapi ia tidak menyangka akibat dari perilakunya menggadaikan kartu PKH subjek dikeluarkan dari keanggotaan bantuan PKH. Dan motif ketiga cenderung terlihat bahwa motif perilaku yang dilakukan atas dasar orientasi masa depan (*In order motive*). Subjek pertama dan kedua merasa takut untuk melakukan perilaku penggadaian kartu PKH karena ancaman akan dikeluarkan dari keanggotaan penerima bantuan PKH. Sedangkan subjek ketiga merasa takut untuk melakukan perilaku penggadaian kartu PKH karena takut dilaporkan dan dijadikan bahan pembicaraan oleh tetangganya. Dan lain halnya pada motif keempat jika di dasarkan pada intersubjektivitasnya dapat terlihat bahwa motif perilaku memberikan pinjaman dengan jaminan kartu PKH didasarkan dari orientasi masa depan (*in order motive*). Subjek melakukan perilaku tersebut karena ingin membantu tetangganya yang sedang kesusahan dan membutuhkan uang dengan cepat. Selain itu pemberlakuan pemberian jaminan kartu PKH juga bertujuan agar agar kartu PKH ini tidak digadaikan kepada orang lain yang tidak dikenal.

Saran

Harapannya dalam lingkup masyarakat bisa mengurangi tingkat konsumtif atau membeli barang-barang yang tidak menjadi kebutuhan pokok dan dapat meminimalisir pengeluaran. sehingga uang bantuan bisa cukup untuk digunakan menjadi biaya hidup sehari-hari hingga mendapatkan bantuan lagi. Dan pihak pemerintah juga dapat lebih baik lagi dalam mengelola bantuan dan lebih baik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan sosialisasi mengenai penggunaannya. Sehingga dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan terhadap dana program bantuan pemerintah khususnya PKH. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dari apa yang sudah direncanakan dan bantuan bisa mencapai sasaran yang tepat yaitu kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asuah, Augustine Yaw, and Antonio Zumelzu. 2021. "What It Means to Live in Spatially Diverse Neighbourhoods: Understanding the Socio-Spatial Ruptures and Fortresses in Temuco." *City, Culture and Society* 27:100399. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2021.100399>.
- Mayangsari, I. 2019. "Peran Bantuan Sosial Pada Aspek Pendidikan Anak Bagi Penerima Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Rumah" *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis ...* 1119–30.

- Muntiyani, Aris Tri. 2006. "PERILAKU KONSUMTIF KELUARGAPRA SEJAHTERA (Study Kasus Pada Kehidupan Keluarga Pra Sejahtera Di Daerah SimpangCandi Panggung Kelurahan MojolanguKecamatan Lowokwaru Kota Malang)."
- Nurchotimah, Aulia Sholichah I., Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, and Yuni Harmawati. 2020. "PERAN PENDAMPING SOSIAL DALAM PENANGANAN KONFLIK KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5(1):61–70.
- Sasmito, Adi. 2009. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Jasa Pegadaian Cabang Gading Surakarta." Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Schutz, Alfred. 1967. *The Phenomenology of Social World*. edited by G. F. L. Walsh. United States of America: Northwestern University Press.
- Shohib, Muhammad. 2015. "SIKAP TERHADAP UANG DAN PERILAKU BERHUTANG." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 03(01):132–43.
- Subadi, Tjipto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by erlina farida hidayati. surakarta: muhammadiyah university press.
- Utomo, Dedy. 2014. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2(1):29–34.